



**EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 23 UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN
: STUDI KASUS WILAYAH HUKUM SUMATERA BARAT**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Hukum**

**Oleh:
Dani Navia
NIM : 2320113035**

**Pembimbing :
Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H.
Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 23 UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN
: STUDI KASUS WILAYAH HUKUM SUMATERA BARAT**

**Dani Navia, 2320113035, Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 102 Halaman, Tahun 2025**

ABSTRAK

Pasal 23 menegaskan bahwa setiap kasus kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali untuk pelaku anak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas penerapan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban di wilayah hukum Sumatera Barat. Penelitian ini menjelaskan tentang efektivitas penerapan hukum Pasal 23 UU TPKS, kendala dalam penerapan Pasal 23 UU TPKS dalam menyelesaikan perkara melalui peradilan, dan upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala penerapan Pasal 23 UU TPKS tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, data dikumpulkan dari wawancara dengan aparat penegak hukum, lembaga pendamping korban, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi Pasal 23 UU TPKS tersebut efektif atau tidak yaitu faktor hukum itu sendiri, lalu faktor penegak hukumnya, lalu faktor sarana prasarannya, lalu faktor masyarakat dan budayanya. Meskipun UU TPKS telah diimplementasikan, terdapat sejumlah kendala yang menghambat efektivitas penerapannya. Kendala tersebut meliputi kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi UU TPKS, minimnya sosialisasi dan pelatihan teknis, serta tekanan sosial dari keluarga korban yang sering kali mendorong penyelesaian secara non-litigasi, inkonsistensi dalam penggunaan dasar hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum, penguatan prosedur administrasi dalam penanganan kasus, serta peningkatan kesadaran hukum di masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan efektivitas penerapan Pasal 23 UU TPKS dapat ditingkatkan, sehingga perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dapat terwujud secara optimal.

Kata kunci:

Efektivitas Hukum, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Perlindungan Korban.

THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 23 OF LAW NUMBER 12 OF 2022 ON SEXUAL VIOLENCE CRIMINAL ACTS IN PROVIDING PROTECTION FOR VICTIMS IN THE LEGAL JURISDICTION OF WEST SUMATRA

**Dani Navia, 2320113035, Master of Law Program, Faculty of Law, Andalas
University, 102 pages, 2025**

ABSTRACT

Article 23 of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (UU TPKS) stipulates that every case of sexual violence must be resolved through the judicial process and cannot be settled outside of court, except in cases involving child perpetrators. This study aims to examine the effectiveness of Article 23 of the UU TPKS in providing legal protection for victims within the jurisdiction of West Sumatra. The research questions addressed in this study include: How effective is Article 23 of the UU TPKS in ensuring legal protection for victims? What are the obstacles in its implementation? And what general efforts are being made to overcome these challenges? This research adopts an empirical juridical method, with data collected through interviews with law enforcement officials, victim support organizations, and the analysis of relevant documents. The findings of this study indicate that the effectiveness of Article 23 is influenced by several factors: the legal substance itself, the competence of law enforcement officers, the availability of supporting infrastructure, as well as societal and cultural attitudes. Despite the implementation of the UU TPKS, a number of obstacles hinder its effectiveness. These include the limited understanding of law enforcement officers regarding the substance of the UU TPKS, the lack of socialization and technical training, social pressures from the victim's family that often encourage non-litigation settlements, and inconsistencies in the application of legal bases. This study recommends continuous capacity-building for law enforcement personnel, the strengthening of administrative procedures in case handling, and the enhancement of legal awareness within society. Through these measures, it is expected that the effectiveness of Article 23 can be significantly improved, thereby ensuring optimal legal protection for victims of sexual violence.

Keywords:

Legal Effectiveness, The Sexual Violence Crime Act, Sexual Violence Crime, Victim Protection.